

**PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENGUJIAN ANGKUTAN KOTA DI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANDUNG**

***THE EFFECT OF CONTROL ON EFFECTIVENESS OF TESTING  
CITY TRANSPORT IN DEPARTMENT OF CONSTRUCTION OF  
BANDUNG DISTRICT***

**Eti Sumondang<sup>1</sup>, Dian Susanti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Masalah penelitian ini adalah pengujian Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung belum berjalan optimal. Untuk menganalisis masalah yang diteliti, penulis mengajukan teori pengendalian dari Hasibuan(2009 : 245) berdasarkan langkah-langkah pengendalian antara lain Menentukan standar-standar, Mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai, Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan Melakukan tindakan perbaikan. Sedangkan teori efektivitas digunakan dari Goggin et.al dalam Soemaryadi (2005 : 111-113) berdasarkan tigadimensi, yaitu *Prosedural (Compliance)*, *Tujuan/Hasil (Result)*, *Perlu adanya tindakan-tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi*.

Metode penelitian yang digunakan Metode Eksplanatori. Adapun teknik pengumpulan data : studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi angket, wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan “*Simple Random Sampling*” (Sampel Secara Acak) dengan sarannya aparat dan pengusaha angkutan kota di Kabupaten Bandung. Teknik analisa data dan pengujian hipotesis menggunakan Koefisien *Rank Spearman*, Uji signifikan dan Koefisien Determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

**Kata kunci:** Pengendalian, Pengujian, Angkutan Kota

**ABSTRACT**

*The background of the problem of this research is that the City Transportation test in the Bandung Regency Perbungan Service has not run optimally. To analyze the problem under study, the authors propose the control theory of Hasibuan (2009: 245) based on the steps of control, among others, Determining standards, Measuring the implementation or results to be achieved, Comparing implementation or results with standards and Making corrective actions. While the effectiveness theory is used from Goggin et.al in Soemaryadi (2005: 111-113) based on three dimensions, namely Procedure (Compliance), Objectives / Results (Results), There needs to be monitoring and evaluation actions.*

*The research method used is the Explanatory Method. The data collection techniques: literature studies and field studies which include questionnaires, interviews and observations. The sampling technique uses "Simple Random Sampling" with the aim of apparatus and municipal transport entrepreneurs in Bandung Regency. Data analysis*

*techniques and hypothesis testing use Spearman Rank Coefficient, Significant Test and Determination Coefficient.*

*The results of the study show that Control has a positive and significant effect on the Effectiveness of City Transportation at the Bandung District Transportation Agency. Thus the hypothesis proposed in this study is empirically tested.*

**Keywords:** Control, Testing, City Transportation

## 1. PENDAHULUAN

Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan pengujian persyaratan laik jalan. Berdasarkan kriteria tersebut, kemudian ditentukan hasil pengujian fisik. Hasil pengujian ini pada akhirnya menentukan tindakan yang nantinya harus dilakukan terkait pengujian fisik tersebut, untuk menentukan hasil pengujian perlu dilakukan analisis yang berfungsi untuk mengetahui kondisi fisik tiap kendaraan.

Pentingnya diadakan pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor ini karena banyaknya kasus kecelakaan di jalan akibat adanya kerusakan pada komponen kendaraan yang tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 19 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas di Kabupaten Bandung pada Pasal 54 antara lain:

- a) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- b) Kendaraan Wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.
- c) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- d) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- e) Pelaksanaan uji berkala dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

Persyaratan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, meliputi :

1. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
2. Kebisingan Suara Kendaraan Bermotor
3. Efisiensi Sistem Rem Utama, Efisiensi Sistem Rem Parkir
4. Kincup Roda Depan

5. Kemampuan Pancar Dan Arah Sinar Lampu Utama

6. Radius Putar

7. Tingkat Suara Klakson

8. Alat Penunjuk Kecepatan

9. Kekuatan Unjuk Kerja Dan Ketahanan Ban Luar Untuk Masing-masing Jenis, Ukuran Dan Lapisan

10. Kedalaman Alur Ban Luar

Standar-standar ambang batas laik jalan kendaraan bermotor antara lain:

a) Pemeriksaan Emisi Gas Buang dan Ketebalan Asap ( *Gas analyzer dan Smoke Tester* )

Dasar hukum : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEPMENLH/35/10/1993 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : PERMENLH/05/2006

b) Pengukuran penyimpangan sikap roda depan ( *side slip tester* )

Dasar hukum pemeriksaan penyimpangan sikap roda depan dengan ambang batas antara -5mm/m sampai dengan +5mm/m diukur pada kecepatan 5km/jam ( Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Pasal 7).

c) Pengukuran intensitas cahaya pada lampu utama jauh beserta penyimpangan ( *headlight tester* )

Dasar hukum pengukuran intensitas cahaya pada lampu utama jauh kendaraan bermotor dengan standar minimal 12000 cd (Lampu jauh kanan dan kiri) dengan penyimpangan ke kanan 0°34'' (Lampu jauh) dan kekiri 1°09'' (Lampu jauh) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 1993.

d) Pengukuran efisiensi gaya pengereman dan penyimpangannya ( *brake tester* )

Dasar hukum pengukuran dengan standar efisiensi kekuatan rem minimal 50% dengan penyimpangan roda kanan dengan kiri maksimal 30% untuk standar eropa (MEE) dan maksimal 8% untuk standar jepang (JIS). (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993).

e) Pengukuran penyimpangan kecepatan ( *speedometer tester* )

Dasar hukum pengukuran penyimpangan kecepatan kendaraan bermotor dengan ambang batas antara -10% sampai +15% pada kecepatan 40 km/jam (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 1993).

f) Pengukuran tingkat suara klakson ( *noise tester* )

Dasar hukum pengukuran tingkat suara klakson kendaraan dengan ambang batas serendah-rendahnya 83

- dB dan setinggi-tingginya 118 dB (Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012).
- g) Kedalaman alur ban luar  
Kedalaman alur ban luar kendaraan bermotor ditentukan serendah-rendahnya 1,00 milimeter.
- h) Radius putar  
Radius putar minimum kendaraan bermotor ditentukan maksimum sebesar 12 meter.

Berdasarkan hasil penjajagan awal melalui hasil observasi, peneliti mendapat informasi dari aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung bahwa dari jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bandung, selama 1 tahun pengujian kendaraan angkutan kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung belum berjalan optimal hal tersebut menunjukkan masalah penting dalam rangka mengoptimalkan kendaraan angkutan kota yang gagal melakukan pengujian berkala setiap tahunnya. hal ini di sebabkan masih banyak angkutan kota tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan uji kir laik jalan dan pada tahun 2015 dengan total 84 kendaraan tidak lulus uji kir, kendalannya berbeda-beda yang tidak lulus uji kir laik jalan seperti: emisi gas buang kendaraan bermotor, kebisingan suara kendaraan bermotor, efisiensi sistem rem, kincup roda

depan, kemampuan panca dan arah sinar lampu utama, radius putar, tingkat suara klakson, alat penunjuk kecepatan, kekuatan unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran dan lapisan, kedalaman alur ban luar.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas di Kabupaten Bandung pada Pasal 54 antara lain :

- a) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- b) Kendaraan Wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang

Indikasi-indikasi lain belum optimalnya pengujian kendaraan angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut :

1. Pada saat melakukan uji kir banyak angkutan kota belum layak melakukan uji kir. di sebabkan fisik angkutan kota belum memenuhi persyaratan yang ada seperti pajak STNK sudah habis, ban yang gundul, lampu tidak menyala, rem yang tidak berfungsi dengan baik, emisi gas buang yang tidak sesuai standar.
2. Banyaknya ditemukan angkutan kota yang sedang beroperasi yang tidak laik jalan dan ternyata

memiliki buku uji kir dan stiker uji kir.

3. Sering di temukan kecurangan saat pemeriksaan emisi gas yang tidak memenuhi standar yang berlaku oleh petugas uji kir.
4. Sanksi tegas bagi petugas yang melakukan penyimpangan saat melakukan uji kir.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengendalian

Pengendalian atau *controlling* adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam organisasi adalah akibat masih lemahnya pengendalian sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.

Menurut Hasibuan (2001:2), bahwa: “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Sedarmayanti(2001 : 9)menjelaskan pengertian pengendalian sebagai berikut :

“Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana, bila terdapat penyimpangan atau kesalahan

diadakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerjasama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaannya”.

Menurut Hasibuan(2007 : 22) sebagai berikut :

“Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan”.

Berdasarkan uraian diatas, pengendalian merupakan suatu kegiatan mengendalikan para pegawai agar bekerja sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dengan adanya pengendalian yang baik dapat mencapai kinerja pegawai yang diharapkan.

### 2.2. Proses Pengendalian.

Proses pengendalian menurut Stoner dalam Hasibuan (2000: 249) dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1.

Menentukan standar-standar

yang akan digunakan dalam pengendalian.

Langkah ini meliputi standar dan ukuran untuk segala hal, dimulai target kerja yang harus dicapai sampai penyelenggaraan kerja. Agar langkah ini efektif, standar tersebut perlu dirinci dalam bentuk-bentuk yang operasional, dipahami dan diterima oleh seriap individu pegawai.

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

Langkah ini merupakan proses berkesinambungan, berulang-ulang (refetitif) dengan frekuensi aktual sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang diukur, misalnya untuk mengukur target atau suatu pencapaian target tertentu.

3. Membandingkan

pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan bila ada.

Langkah ini dalam banyak hal merupakan yang paling mudah ditempuh dalam proses pengendalian, sifat kompleksnya mungkin telah diatasi dalam langkah sebelumnya. Sehingga dalam langkah ini hanya membandingkan hasil yang telah dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, maka dapat dikatakan bahwa segala

sesuatunya berjalan secara terkendali.

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencan. Apabila prestasi belum tercapai atau menurun, dan analisis menunjukkan perlu mengambil tindakan. Adapun tindakan ini dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak prestasi.

### 2.3 Efektivitas

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan".

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat

dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Pengertian efektivitas menurut Dunn (2003 : 493) adalah : ”Suatu kriteria untuk menseleksi alternatif untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi”

Agar pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan efektif apabila menggunakan konsep sebagai pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan dimensi-dimensi seperti yang dikemukakan oleh Goggin et.al dalam Soemaryadi (2005 : 111-113) mendapatkan 3 (tiga) kriteria efektivitas sebagai berikut :

1. Prosedural (*Compliance*), adalah semua aktivitas yang dijalankan oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan secara tegas dan autoratif dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Tujuan/Hasil (*Result*) yaitu menyangkut tujuan dan persoalan dasar (*Substansial*) yang hendak

dipecahkan melalui kebijaksanaan (*Problem Solving Oriented*).

3. Perlu adanya tindakan-tindakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi sebagai upaya untuk memantau secara berkala agar efektifitas berjalan tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan, karena dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesegera mungkin. upaya ini dapat dilakukan secara langsung yaitu melalui laporan-laporan atau catatan-catatan tertulis.

#### **2.4. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan diopersikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan pengujian berkala dimaksudkan untuk :

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari teori-teori yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :”Besaaturannya Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengujian Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung”. ditentukan oleh dimensi menentukan standar, mengukur pelaksanaan atau hasil dengan standardan melakukan tindakan perbaikan”

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (Explanatory Research) yang dimana data informasi dapat dikumpulkan

dari populasi, yang hasil datanyadikumpulkan dan dianalisis untuk dapat mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi atas 2 (dua) sumber yaitu Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Primer. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Rank Spearmen.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis besarnya pengaruh Variabel Pengendalian Terhadap Variabel Efektivitas Pengujian Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, yang dihitung dengan Koefisien Korelasi Rank Spearman dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Korelasi Rank Spearman**

			Pen gen dali an	Efekt ivitas
Spe arm an's rho	P	Correlation Coefficient	1.00 0	.814* *
	n	Sig. (2- tailed)	.	.000
	e	N	78	78
	n			
	d			
	al			
	ia			
	n			
	E	Correlation Coefficient	.814 **	1.00 0
	fe	Sig. (2- tailed)	.000	.
	kt	N	78	78
	iv			
	it			
	as			

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data SPSS V.21

Dari tabel di atas terlihat bahwa korelasi atau hubungan antara Variabel Pengendalian dengan Variabel Efektivitas Pengujian Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah sebesar 0,814. Hal ini memperlihatkan korelasi diantara dua variabel tersebut adalah kuat dan searah

#### 4.2 Perhitungan Koefisien Determinasi

Setelah dilakukan perhitungan korelasi atau hubungan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

perhitungan besarnya pengaruh dengan menghitung koefisien determinasi yaitu sebagai berikut :

$$KD = rs^2 \times 100\%$$

$$KD = (0,814)^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,6626 \text{ atau } 66,26 \%$$

Ini menunjukkan bahwa pengaruh Variabel Pengendalian hanya memberikan variasi sebesar 66,26% Terhadap Efektivitas Pengujian Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, hal tersebut memperlihatkan ada sebesar 33,74 % faktor-faktor

lain yang mempengaruhi Variabel Efektivitas Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang tidak diteliti.

### 4.3 Uji Hipotesis

Langkah terakhir adalah melakukan pengujian hipotesis atau dugaan sementara dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

- $\rho \neq 0$  Tidak terdapat Pengaruh Pengujian Angkutan Kota Terhadap Efektivitas Pengujian Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
- $\rho = 0$  Terdapat Pengaruh Pengujian Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan

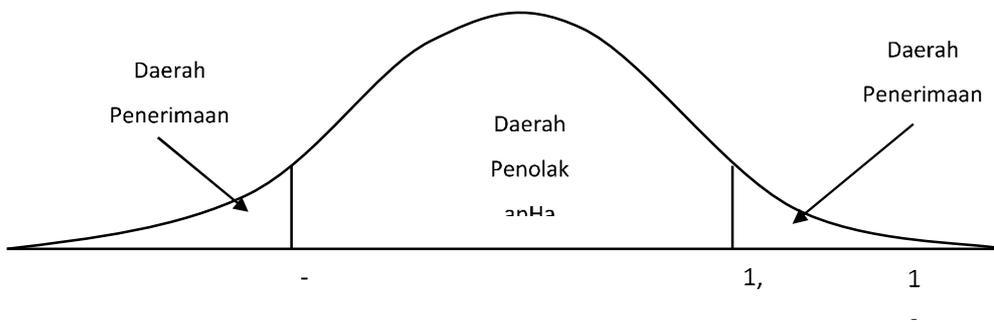
dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$t = rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}}$$

$$t = 0,814 \sqrt{\frac{78-2}{1-0,814^2}}$$

$$t = 12,217$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan t-tabel adalah 1,9917. Ini berarti bahwa nilai t yang diperoleh yaitu sebesar 12,217 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 1,9917 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal sebagai berikut :



**Gambar 4.6**  
**Distribusi Normal t**

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 12,217 berada pada daerah penerimaan  $H_a$ , artinya bahwa hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh Variabel Pengendalian Terhadap Variabel Efektivitas Pengujian Angkutan Kota Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

#### 4.2. Pembahasan

Dalam mengkaji Pengendalian telah banyak model-model yang dikemukakan oleh para pakar, tetapi untuk menganalisis Pengendalian, peneliti menggunakan pendekatan teori sebagaimana dikemukakan Hasibuan (2009 : 245) yaitu pengendalian perlu dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah pengendalian yang dapat dijadikan alat ukur dari pengendalian yaitu (1) menentukan standar-standar yang akan digunakan dalam pengendalian, (2) mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, (3) membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan bila ada, (4) melaksanakan tindakan perbaikan. Secara keseluruhan indikator yang diajukan sebanyak 12 (duabelas) indikator. Dari masing-masing variabel Pengendalian dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Pengaruh yang kuat antara variabel Pengendalian dengan Efektivitas terhadap Efektivitas Pengujian Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada Efektivitas Pengujian Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung tidak terlepas kaitannya dengan pengendalian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No . 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas di Kabupaten Bandung

Variabel ( $X_1$ ) melalui langkah-langkah pengendalian, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi PKB Perhubungan Kabupaten Bandung menyebutkan bahwa pada saat melakukan pengujian emisi gas buang dan ketebalan asap pada angkutan kota masih di temukan beberapa angkutan kota yang tidak memenuhi standar yang telah di tentukan, bagi para pengusaha angkutan kota yang belum memenuhi standar yang ditentukan kami memberikan kesempatan untuk melakukan pengujian ulang dengan jangka waktu maksimal 2 bulan.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa dalam pengujian emisi gas buang dan ketebalan asap angkutan kota masih di temukan beberapa angkutan kota yang

tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan oleh dinas perhubungan kabupaten Bandung..

Variabel (X2) melalui langkah-langkah pengendalian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, berdasarkan laporan setiap tahunnya adanya pengurangan jumlah angkutan kota yang belum melakukan pengujian laik jalan ini berarti ada peningkatan jumlah angkutan kota yang melakukan uji kir, semua petugas sudah melakukan pekerjaan yang cukup baik sesuai dengan prosedur yang ada karena ada kenaikan jumlah kendaraan angkutan kota yang melakukan uji kir secara berkala.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, peneliti melihat bahwapara petugas melakukan kinerja sudah cukup baik pada saat melakukan uji kir melakukan sesuai dengan prosedur yang ada agar mencapai tujuan yang di inginkan, untuk mengurangi jumlah angkutan kota yang belum melakukan uji kir.

Variabel (X3) melalui langkah-langkah pengendalian, yaitu dimensi ketiga adalah membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard an menentukan penyimpangan bila ada yang terkofer Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

penyelia Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, mengatakan masih banyak ditemukan angkutan kota dengan kekuatan pancaran lampu sudah tidak memenuhi standar saat beroperasi, hal ini dikarenakan para pemilik angkutan kota menganggap pancaran lampu tidak begitu penting, jadi pada saat mereka melakukan pengujian berkala mereka meminjam lampu pemilik angkutan kota lain yang memenuhi standar.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan masih banyak angkutan kota yang sedang beroperasi pada malam hari pancaran lampu kanan dan kirinya tidak memenuhi standar, seperti cahaya lampunya redup bahkan ada lampu angkutan kota yang sedang beroperasi ada yang tidak menyala..

Variabel (X4) melalui langkah-langkah pengendalian, yaitu dimensi keempat adalah “tindakan perbaikan”. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala PKB, menjelaskan bahwa setiap petugas yang melakukan penyimpangan akan di berikan sanksi tegas, dengan di berikan surat peringatan pertama sampai peringatan ketiga, ternyata masih saja melakukan penyimpangan akan di cabut sertifikat kompetensi pengujiannya kenaikan pangkat juga di tunda dan bila

peringatan-peringatan tersebut masih tidak diindahkan maka akan dilakukan pemecatan terhadap petugas tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa, Kepala Seksi PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, sudah memberikan sanksi tegas kepada para petugas pengujian apabila melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah terhadap Efektivitas Pengujian Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang cukup besar pengaruhnya dan belum dikaji pada penelitian ini. Asumsi peneliti faktor-faktor lain tersebut diantaranya Implementasi Kebijakan dan Koordinasi.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara Pengendalian Terhadap Variabel Efektivitas Pengujian Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mempunyai hubungan sebesar 0,814 pada taraf uji  $\alpha$

$=0.05$  dan menurut Sugiyono (2005:214) angka ini menunjukkan hubungansangat kuat. Hal ini dikarenakan didalam pengaruh Pengendalian Terhadap Variabel Efektivitas Pengujian Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung secara keseluruhan dinilai cukup baik berdasarkan penilaian yang meliputi dimensi Menentukan standar-standar, Mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai, Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan Melakukan tindakan perbaikan..

### Pengaruhnya

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 0,814, dimana  $t_{tabel}$  sebesar 1,9917. masih lebih kecil dari harga  $t_{hitung}$  sebesar 12,217 sehingga hipotesis penelitian ini dapat diterima.

### 5.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Pengendalian terhadap efektivitas Pengujian Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung., peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

3. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk lebih mengawasi kinerja petugas pengujian Kir Angkutan Kota di Kabupaten Bandung dapat mengendalikan para petugas pengujian KIR, agar saat bertugas mereka melakukan tugasnya sesuai

- dengan standar-standar yang berlaku.
4. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pengujian Kir Angkutan Kota di Kabupaten Bandung sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pengujian kendaraan angkutan kota, dan memberi sanksi tegas kepada pemilik angkutan kota yang tidak layak jalan tapi tetap beroperasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku :

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Alih Bahasa oleh Samoedra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Adna, dan Erwan Agus Purwanto). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasibuan SP, Malayu. 2006. *Manajemen (dasar, pengertian, dan masalah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : PN Citra Utama
- Supriyono, 2000 *Sistem Pengendalian Manajemen* Jakarta:Ghalia Indonesia
- .
- Dokumen dan Sumber lain :**
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 *tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Perda Nomor 9 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kabupaten Bandung*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)